PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : **EKSEKUTIF**

LEMBAGA : **KEMENTERIAN KESEHATAN**

UNIT KERJA : **PIMPINAN TERTINGGI**

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **BUDI GUNADI SADIKIN**
2. Jabatan : **MENTERI KESEHATAN**
3. NHK : **92423**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN — Rp. 102.000.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 582 m2/292 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 55.000.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 331 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 22.000.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 1.193 m2/568 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 160 m2/160 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 160 m2/160 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN — Rp. 1.140.000.000

1. MOBIL, MERCEDES BENZ E 300 SEDAN Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
2. MOBIL, MINI COOPER SEDAN Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
3. MOBIL, MAZDA 2 ALL NEW SKYACTIV R AT Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 140.000.000
4. MOBIL, HYUNDAI IONIC 5 SIGNTR LONG Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA — Rp. 3.376.250.001

D.	SURAT BERHARGA	Rp.	103.659.968.679
E.	KAS DAN SETARA KAS	Rp.	21.793.048.425
F.	HARTA LAINNYA	Rp.	----
	Sub Total	Rp.	231.969.267.105
III.	HUTANG	Rp.	10.505.452.216
IV.	TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	221.463.814.889

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari *elhkpn.kpk.go.id.* Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui *elhkpn.kpk.go.id*, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.